

► PASAR IR. SOEKARNO

"Ada Upaya Hambat Audit"

SUKOHARJO—Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukoharjo, Agus Santosa, menduga ada upaya dari pihak tertentu untuk menghambat proses audit proyek Pasar Ir. Soekarno oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kurniawan
redaksi@solopos.co.id

Hal itu dikatakan Sekda saat dimintai tanggapannya mengenai pembukaan paksa pintu masuk proyek Pasar Ir. Soekarno yang berujung dilaporkannya Pemkab ke Polres Sukoharjo, Sabtu (18/1) lalu. Ditemui *Espos* di ruang kerjanya, Senin (20/1), Agus mengatakan pihaknya sudah berhitung matang mengenai langkah membuka pintu pagar proyek Pasar Ir. Soekarno itu.

Dia menegaskan hal itu dilakukan untuk memfasilitasi tim audit BPK dan ahli konstruksi dari Pusat Studi Ilmu Teknik (PSIT) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang digandeng BPK. "Yang diperiksa itu pemerintah daerah, kaitannya dengan penggunaan uang negara untuk pembangunan Pasar Ir. Soekarno. BPK tidak memeriksa PT Ampuh Sejahtera. Jadi ada kewajiban Pemkab untuk memfasilitasi pemeriksaan itu supaya lancar," kata dia.

Agus mengungkapkan ada sinyalemen pihak tertentu berupaya menghambat proses audit oleh tim BPK. Tujuannya mengeruk keuntungan

- Sekda Agus Santosa menegaskan pembukaan paksa pintu masuk proyek Pasar Ir. Soekarno untuk mempercepat proses audit.
- HPPKS mengapresiasi langkah Pemkab tersebut dan menyayangkan sikap PT Ampuh Sejahtera.

pribadi atau kelompok dari ketidakpastian proyek pasar. Padahal di sisi lain, Pemkab telah berkomitmen supaya proyek segera selesai.

"Kami tidak ingin menuduh pihak lain, *mangga* masyarakat yang menilai. Yang pasti sikap Pemkab merupakan respons atas tuntutan pedagang supaya proyek segera rampung. Pemkab tidak ingin menelantarkan pedagang. Kami berharap semua pihak bekerja sama."

Agus menambahkan tim audit BPK hanya punya waktu satu bulan untuk mengaudit proyek Pasar Ir. Soekarno tepatnya mulai 15 Januari hingga 15 Februari 2014.

Pemeriksaan Polisi

Karena itu pihaknya berharap tidak ada upaya-upaya menghambat proses audit itu. Lebih jauh, Agus menguraikan Pemkab sudah membayar 75 persen atau sekitar Rp18 miliar dari nilai kontrak proyek pasar. Artinya secara material, menurut dia, barang proyek adalah milik Pemkab.

Selain itu Agus menegaskan status lahan proyek Pasar Ir. Soekarno merupakan milik Pemkab Sukoharjo. "Dan kami tidak merusak bangunan, tidak merusak pagar, sebatas membuka pintu. Tapi bila itu dianggap sebagai perusakan ya kami hormati yang ditempuh PT AS [Ampuh

Sejahtera]," ujar dia.

Terpisah, Ketua Himpunan Pedagang Pasar Kota Sukoharjo (HPPKS), Fajar Purwanto, mengapresiasi langkah Pemkab. Alasannya, sikap tegas Pemkab menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikan pasar.

Di sisi lain, Fajar menyayangkan sikap PT Ampuh Sejahtera yang terkesan memperlambat proses audit BPK. "Kami bisa memahami apa yang dilakukan Pemkab. Kami apresiasi positif hal itu. Tapi mengapa justru PT Ampuh Sejahtera bersikap seperti itu?"

Sementara itu, Polres Sukoharjo tengah mendalami laporan PT Ampuh Sejahtera. Kasubbag Humas Polres Sukoharjo, AKP Joko Sugiyanto, mewakili Kapolres Sukoharjo, AKBP Ade Sapari, kepada wartawan, Senin, mengatakan pihaknya sudah mendatangi lokasi. "Kami melakukan identifikasi di lokasi. Selanjutnya, kami melakukan pemeriksaan awal, terutama pelapor."

Polres Sukoharjo baru memeriksa dua saksi yakni Manajer Teknis PT Ampuh Sejahtera, Ajiyono dan seorang saksi bernama Bambang.

Ajiyono mengatakan sudah diperiksa saat menyampaikan laporan Sabtu lalu. Namun soal tuduhan menghambat proses audit BPK, ia belum bisa dimintai banyak keterangan.

(Ivan Andimuhtarom)